
PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI ASN, DAN PENERAPAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Oleh :

Irvan Noormansyah,**Humairi Arkeda Sirkomba**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta

Email : irvan@stei.ac.id

Article Info*Article History :**Received 16 Agustus - 2022**Accepted 25 Agustus - 2022**Available Online**30 September - 2022***Abstract**

This study aims to determine: (1) the influence of implementation accounting standard on the Performance Accountability in Government Institutions, (2) the influence of civil servant competency on the Performance Accountability in Government Institutions, (3) the influence of implementation good governance on the Performance Accountability in Government Institutions. The population in this study is the Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia. Purposive sampling is used as a method of determining the sample in the form of primary data with data collection instruments using questionnaires. The sample to be used is a work unit that is directly related to the Performance Accountability In Government Institutions. This study uses multiple regression analysis techniques. Based on the results of the study, it is known that: (1) the implementation of accounting standards has a positive but not significant effect for the Performance Accountability in Government Institutions, (2) civil servant competency has a positive and significant effect for the Performance Accountability in Government Institutions, (3) the implementation of good governance has a negative but not significant effect for the Performance Accountability in Government Institutions.

Keyword :

Accounting Standard; Civil Servant Competency; Good Governance; Performance Accountability In Government Institutions

1. PENDAHULUAN

Kinerja instansi pemerintah saat ini banyak mendapat sorotan karena semakin mudahnya informasi dapat diakses masyarakat. Terutama terkait instansi pemerintah yang terlihat kurang peka terhadap upaya perbaikan kinerja yang lebih efisien dan efektif karena masih banyaknya kinerja instansi pemerintah yang belum menunjukkan peningkatan yang signifikan (Pratama, 2019). Keadaan tersebut menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan dari masyarakat kepada pemerintah atas pelayanan publik yang jauh lebih baik. Untuk mewujudkan akuntabilitas, dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa media pertanggung jawaban yang dapat memberikan informasi apakah program yang dilaksanakan sesuai rencana yang digunakan, yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) (Pratama, 2019). Laporan Kinerja

tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam upaya meningkatkan Akuntabilitas pada Kementerian dan Lembaga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menempatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan sebagai salah satu komponen atas penilaian Reformasi Birokrasi yang dilakukan Kementerian dan Lembaga. Indikator dari Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan yaitu Opini

BPK dan Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP). ASN wajib mempunyai perilaku dan sikap yang menjadi dasar dalam bernegara dan mengayomi masyarakat. Aparatur tidak hanya menjalankan tugas dan fungsinya tetapi perilaku dan sikap juga menjadi aspek yang harus diperhatikan, setiap aparatur yang terdidik biasanya diikuti oleh sikap dan perilaku yang terdidik, meskipun hal itu bukan menjadi jaminan tetapi ada proses pendidikan dan pembinaan terhadap aparatur untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik secara formal yang berhubungan dengan kompetensinya maupun secara informal yang berhubungan dengan aspek kognitifnya (Wibowo, 2016:180) dalam Rustiana (2016). Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan dukungan kompetensi sumber daya manusia yang memadai juga harus sejalan dengan penerapan *Good Governance* di Sektor Pemerintah. Indikator dari kesuksesan penerapan akuntabilitas kinerja oleh suatu kementerian dapat dilihat dari implementasi yang diterapkan pada kementerian/instansi pemerintah tersebut. Hal ini akan sejalan dengan adanya penerapan *Good Governance* melalui reformasi birokrasi yang dijalankan oleh suatu pemerintahan. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam menjalankan Reformasi Birokrasi dalam Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan secara konsisten mendapatkan Opini WTP dari BPK selama 5 tahun berturut-turut dari 2016 hingga 2020 namun pada Nilai Akuntabilitas Kinerja mendapat nilai 65,01-69,18 dari tahun 2016 hingga 2020 berdasarkan LAKIP Tahun 2021 Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Dimana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Nilai Reformasi Birokrasi secara kementerian kurang mengalami peningkatan.

Hasil penelitian-penelitian sebelumnya mengenai kejelasan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Sipil Negara, dan Penerapan *Good Governance* telah banyak dilakukan, tetapi masih terdapat ketidakkonsistenan pada hasil penelitian yang telah dilakukan. Perbedaan penelitian pada variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kesuksesan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik, (Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999). Mudrikah (2020) menyatakan bahwa dalam rangka

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut penelitian Mudrikah dan Karlina (2020), yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berbeda dengan hasil penelitian dari Darma (2019) yang menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif secara signifikan. Pada variabel Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut penelitian Oktavia, dkk (2021), yang menemukan bahwa Kompetensi Aparatur Sipil Negara tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berbeda dengan hasil penelitian dari Ramadhania dan Novianty (2020) yang menyatakan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif secara signifikan. Pada variabel Penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menurut penelitian Nasir dan Gunawan (2019), yang menyatakan bahwa Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berbeda dengan hasil penelitian dari Hidayat, dkk (2021) yang menyatakan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Fenomena tidak konsistennya hasil penelitian terdahulu membuat penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah masih dianggap sebuah masalah yang menarik untuk diteliti.

Sehubungan dengan hal tersebut perumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian? 2) Apakah Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian? 3) Apakah Penerapan *Good Governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian?

2. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

pertanggungjawaban publik, pemerintah daerah harus melakukan optimalisasi anggaran yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif (*value for money*) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban untuk menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja ini dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi

pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang bersangkutan wajib mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini yang kemudian akan dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan acuan utama dalam menerapkan akuntansi pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintah berfungsi sebagai jembatan antara pihak pemerintah dan para pemegang kepentingan termasuk masyarakat untuk memberikan output pelaksanaan keuangan negara yang akuntabel (Triwardana, 2017). Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam Standar Akuntansi Pemerintahan mengatakan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya standar tersebut maka laporan keuangan harus didasarkan pada standar ini sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kompetensi Aparatur Sipil Negara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 38 Tahun 2017 Pasal 1 mendefinisikan Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja (PPPK) yang dilantik oleh penanggungjawab kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu instansi atau melakukan tugas kedinasan lainnya dan diberikan insentif berdasarkan aturan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil merupakan seorang warga negara Indonesia yang memenuhi kriteria dan dilantik sebagai Pegawai ASN secara resmi oleh penanggungjawab kepegawaian. Sementara Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2017 menyatakan bahwa seorang pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang diangkat oleh penanggungjawab kepegawaian dan diberikan tugas dalam suatu instansi atau melakukan tugas kedinasan lainnya dan diberikan insentif berdasarkan aturan yang berlaku.

Good Governance

“*Good Governance* merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat atas segala tindakan yang dijalankan oleh suatu instansi, dan sebagai bentuk perencanaan atas arah kebijakan suatu instansi.” (Maryani, 2016) “*Good Governance* merupakan prasyarat utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan yang baik akan mempengaruhi implementasi program-program pembangunan nasional. Semakin akuntabel penerapan Good Governance, maka semakin bagus pula kualitas suatu laporan keuangan pemerintah.” (Permen PANRB No.25 Tahun 2020). Menurut definisi dari United Nation Development program (UNDP) dalam Mardiasmo (2009), *Good Governance* mempunyai tiga kaki, yaitu sebagai berikut:

1. Tata kelola ekonomi, adalah tahapan dalam pengambilan keputusan yang mengarahkan aktivitas ekonomi dalam negeri dan antar pelaku ekonomi. Tata kelola ekonomi mempunyai penerapan terhadap Ekuitas, Properti dan Kualitas Hidup Masyarakat.
2. Tata Kelola Politik, adalah tahapan dalam pengambilan keputusan untuk penyusunan suatu kebijakan.
3. Tata Kelola Administratif, merupakan perwujudan dari proses kebijakan. Tata kelola pemerintahan fokus terhadap proses pengelolaan pemerintahan dengan adanya para pemangku kepentingan yang terlibat dalam sektor sosial, ekonomi dan juga politik serta aktif dalam pengelolaan keuangan negara.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Saat menyiapkan dan mengajukan laporan pertanggungjawaban keuangan, pedoman dasar, standar akuntansi pemerintahan, harus konsisten dengan sistem anggaran pemerintah. Oleh karena itu, klasifikasi anggaran dari standar akuntansi pemerintahan harus sama dengan sistem anggaran. Artinya sistem akuntansi keuangan instansi yang digunakan oleh pemerintah harus sesuai dengan anggaran pemerintah dan standar akuntansi (klasifikasi anggaran). Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2020), menunjukkan bahwa semakin baiknya penerapan akuntansi (sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan) akan memberikan dampak yang positif yaitu semakin baiknya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Darma (2019) membuktikan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengertian kompetensi menurut Robbins (2007:38) dalam Fiddin (2021) adalah kemampuan (ability) atau kapasitas seseorang untuk mengerjakan atau melakukan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan dimana kemampuan ini ditentukan oleh 2 (dua) faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik. Menurut Undang-undang No. 5 tahun 2014 pegawai ASN merupakan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2020), membuktikan bahwa dengan bidang pekerjaan dan jenjang pendidikan yang semakin tinggi dibidangnya dapat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, dkk (2021) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Metode kuantitatif bertujuan untuk menguji beberapa hipotesis yang telah ditentukan. Survei dilakukan untuk melihat pilihan yang diberikan oleh individu atau kelompok dalam suatu sampel/populasi. Pada umumnya, survei yang dilakukan dalam bentuk pengisian kuesioner. Kuesioner dapat dijadikan alat pengambilan dan pengumpulan data dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sampel adalah porsi, atau bagian dari populasi yang sejenis (Lind, 2014:8). Metode yang digunakan untuk memilih sampel dalam penelitian ini adalah judgement sampling, yaitu salah satu dari jenis *purposive sampling*, di mana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud

H2: Kompetensi Aparatur Sipil Negara berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Koiman (2014:273), governance merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa governance merupakan mekanisme mekanisme, proses-proses dan institusi-institusi melalui warga Negara mengartikulasi kepentingan-kepentingan mereka, memediasi perbedaan-perbedaan mereka serta menggunakan hak dan kewajiban legal mereka. Penelitian yang dilakukan oleh Nasir, dkk (2019) membuktikan penerapan *good governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini didorong dengan adanya *blueprint* mengenai pelaksanaan *good governance*. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman, dkk (2020) membuktikan penerapan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut.

H3: Penerapan *Good Governance* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

penelitian. Adapun kriteria yang digunakan untuk menentukan sampel penelitian ini yaitu berada pada unit yang terlibat dalam penyusunan perencanaan, unit yang berfungsi sebagai koordinator dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja, unit yang berfungsi mengawal akuntabilitas kinerja. Dengan segala keterbatasan yang dimiliki, peneliti menggunakan jumlah sampel pegawai yang dipilih dari yang bekerja pada unit Bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja, Bidang Program dan Tata Kelola Sekretariat Kedeputian, Bagian Program dan Anggaran, Bagian Keuangan yang memiliki masa kerja minimal 2 tahun pada bagian tersebut sesuai variabel penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, penerapan *good governance*, kompetensi ASN serta Inspektorat sebagai *quality assurance* atas akuntabilitas kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Analisis Regresi Berganda

Dari analisis asumsi klasik terbukti bahwa model persamaan yang diajukan dalam penelitian ini sudah dianggap baik. Analisis regresi bertujuan

untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Pengolahan data dengan program SPSS memberikan nilai koefisien persamaan regresi seperti tabel di bawah ini:

Tabel 1 Hasil Analisis Linier Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	31.108	3.324		9.359	.000		
PSAP	.107	.100	.200	1.068	.291	.422	2.370
Kompetensi_ASN	.173	.069	.445	2.521	.015	.473	2.113
Good_Governance	-.094	.106	-.150	-.889	.378	.518	1.931

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber : Output SPSS (data diolah, 2022)

Dari tabel 1 diatas dapat disusun persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$AKIP = 31,108 + 0,107PSAP + 0,173KASN - 0,094GG + e$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Koefisien regresi pada variabel X1 (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan) sebesar 0,107 dan nilai Sig sebesar 0.291 > 0.05 artinya variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memberikan pengaruh positif namun tidak signifikan dalam mempengaruhi pemahaman tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti bila standar akuntansi pemerintahan meningkat sebesar kelipatan 1 x maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan naik sebesar 10,7% demikian juga sebaliknya.
- Nilai Variabel X2 (Kompetensi Aparatur Sipil Negara) sebesar 0,173 dan nilai Sig sebesar 0.015 < 0.05 artinya variabel Kompetensi ASN memberikan pengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi pemahaman tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah. Hal ini berarti bila kompetensi ASN meningkat sebesar kelipatan 1 x maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan naik sebesar 17,3% demikian juga sebaliknya.

- Nilai Variabel X3 (Penerapan *Good Governance*) sebesar 0,094 dan nilai Sig sebesar 0.378 > 0.05 artinya variabel Penerapan *Good Governance* memberikan pengaruh negatif namun tidak signifikan dalam mempengaruhi pemahaman tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini berarti bila Penerapan *Good Governance* meningkat sebesar kelipatan 1 x maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah akan naik sebesar 9,4% demikian juga sebaliknya.

Uji Koefisien Determinasi

Pengujian ini bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini, dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square). Hasil Uji Adjusted R Square adalah sebagai berikut :

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.513 ^a	.263	.219	3.16156	2.058

a. Predictors: (Constant), Good_Governance, Kompetensi_ASN, PSAP

b. Dependent Variable: AKIP

Sumber : Output SPSS (data diolah, 2022)

Berdasarkan hasil koefisien determinasi di atas, besarnya Adjusted R Square adalah 0,219 atau sebesar 21,9%. Hasil perhitungan statistik ini berarti kemampuan variabel independen (penerapan standar akuntansi pemerintahan,

kompetensi ASN, dan penerapan *good governance*) dalam mempengaruhi perubahan variabel dependen (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebesar 21,9% sisanya 78,1%

dijelaskan oleh variabel lain di luar model regresi yang diteliti.

Uji Simultan (Uji-F)

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas (Independen) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variabel terikat. Uji simultan dilakukan dengan menganalisis data penelitian yang telah diolah

dengan kriteria pengujian yaitu jika nilai Sig F lebih besar dari 0,05 maka secara simultan variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat, dan sebaliknya jika Sig F lebih kecil sama dengan (\leq) dari 0,05 maka secara bersama-sama (simultan) variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (dependen).

Tabel 3 Hasil Uji Simultan (Uji-F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	178.541	3	59.514	5.954	.001 ^b
	Residual	499.774	50	9.995		
	Total	678.315	53			

a. Dependent Variable: AKIP

b. Predictors: (Constant), Good_Governance, Kompetensi_ASN, PSAP

Sumber : Output SPSS (data diolah, 2022)

Dari tabel 3 dapat diketahui bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi ASN, dan Penerapan *Good Governance* bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara simultan atau bersama-sama yang ditunjukkan dengan nilai signifikan 0.001

yang lebih kecil dari 0.05 dan nilai F Hitung 5,954 yang lebih besar dari F Tabel 2,790. Berarti variabel bebas mampu menjelaskan variabel terikat secara simultan.

Uji Parsial (Uji-T)

Uji nilai t (Uji Individual) dapat dilihat pada tabel 4 berikut ini:

Tabel 4 Hasil Uji Parsial (Uji-T)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	31.108	3.324		9.359	.000		
	PSAP	.107	.100	.200	1.068	.291	.422	2.370
	Kompetensi_ASN	.173	.069	.445	2.521	.015	.473	2.113
	Good_Governance	-.094	.106	-.150	-.889	.378	.518	1.931

a. Dependent Variable: AKIP

Sumber : Output SPSS (data diolah, 2022)

Pengujian hipotesis dengan bantuan *statistic software SPSS Release 23.0* melalui regresi dilakukan dengan menguji persamaan regresi secara individual terhadap masing-masing variabel independen.

a. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig = 0,291 > level of significant = 0,05 dengan nilai koefisien sebesar 0,107 yang memiliki arah pengaruh positif, artinya penerapan standar akuntansi berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama H1 diterima.

b. Kompetensi ASN

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah kompetensi aparatur sipil negara berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig = 0,015 < level of significant = 0,05, dengan nilai koefisien sebesar 0,173 yang memiliki arah pengaruh positif, artinya kompetensi aparatur sipil negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua H2 diterima.

c. Penerapan Good Governance

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah penerapan *good governance* berpengaruh negatif terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai sig = 0,378 > level of significant = 0,05, dengan nilai koefisien sebesar 0,094 yang

memiliki arah pengaruh negatif, artinya penerapan *good governance* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga H3 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan telah diterapkan dengan baik di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah semakin baik yang dihasilkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Setyowati (2020) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa semakin baiknya penerapan akuntansi (sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan) akan memberikan dampak yang positif yaitu semakin baiknya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil penelitian lainnya dilakukan oleh Fitriyani, dkk (2019) juga menunjukkan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan menerapkan akuntansi yang sesuai dengan SAP dalam penyusunan laporan keuangan mampu menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga menyediakan informasi yang andal dan relevan dapat membantu stakeholder dalam memeriksa pelaksanaan kegiatan dan terhindar dari kemungkinan terjadinya salah saji data.

Pengaruh Kompetensi Aparatur Sipil Negara terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur sipil negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini tentunya menjadi fokus pada bagian sumber daya manusia untuk terus meningkatkan kompetensi para pegawai khususnya pada bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja, bagian Program dan Anggaran, bagian Keuangan, Inspektorat, dan

bagian Program dan Tata Kelola Sekretariat Kedeputan yang secara langsung berpengaruh dalam menjaga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Setyowati (2020) hasil penelitiannya membuktikan bahwa dengan bidang pekerjaan dan jenjang pendidikan yang semakin tinggi dibidangnya dapat berpengaruh signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hidayat, dkk (2021) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya Kompetensi yang baik akan dapat meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Kompetensi yang baik akan mempertimbangkan tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar hasil kinerja lebih efektif.

Pengaruh Penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Penerapan *Good Governance* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini disebabkan baru dibentuknya unit kerja Bagian Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 yang berfokus terhadap tata kelola pemerintah. Sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menciptakan iklim tata kelola pemerintahan yang baik di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nasir, dkk (2019) hasil penelitiannya membuktikan penerapan *good governance* berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Namun Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian Hidayat, dkk (2021) yang menyatakan bahwa Penerapan *Good Governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dapat disimpulkan hasil ini menggambarkan bahwa di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian *Good Governance* dianggap tidak memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan terkait pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Sipil Negara dan Penerapan *Good Governance* terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan sudah diterapkan dengan baik oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Semakin baiknya penerapan akuntansi (sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dalam penyusunan Laporan Keuangan) akan memberikan dampak yang positif yaitu semakin baiknya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- b. Variabel kompetensi aparatur sipil negara berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang

Perekonomian. Hal tentunya menjadi fokus pada bagian sumber daya manusia untuk terus meningkatkan kompetensi para pegawai khususnya pada bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja, bagian Program dan Anggaran, bagian Keuangan, Inspektorat, dan bagian Program dan Tata Kelola Sekretariat Kedeputan yang secara langsung berpengaruh dalam menjaga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Variabel penerapan *good governance* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini disebabkan baru terbentuknya unit kerja bagian reformasi birokrasi yang fokus terhadap tata kelola pemerintah pada tahun 2020. Sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta menciptakan iklim tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

<https://doi.org/10.35829/magisma.v9i1.145>

6. REFERENSI

2013. Standar Akuntansi Pemerintahan. Bandung: Fokusindo Mandiri
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2021. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2020
- Darma, D.A. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publikasi Vol 9. No. 2, 118-124*, <https://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/akuntansibisnisdanpublik/article/view/456>
- Fiddin, F. (2021). Akuntabilitas Keuangan dan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan Perindustrian Kota Pekanbaru. *Jurnal Magisma Volume IX. No. 1, 63-70*,
- Perekonomian. Hal tentunya menjadi fokus pada bagian sumber daya manusia untuk terus meningkatkan kompetensi para pegawai khususnya pada bagian Fasilitasi Penguatan Kinerja, bagian Program dan Anggaran, bagian Keuangan, Inspektorat, dan bagian Program dan Tata Kelola Sekretariat Kedeputan yang secara langsung berpengaruh dalam menjaga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- Variabel penerapan *good governance* berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Hal ini disebabkan baru terbentuknya unit kerja bagian reformasi birokrasi yang fokus terhadap tata kelola pemerintah pada tahun 2020. Sehingga membutuhkan waktu untuk penyesuaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta menciptakan iklim tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam hal meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- <https://doi.org/10.35829/magisma.v9i1.145>
- Fitriyani, N., & Herawati, H. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Sistem Pengendalian Intern Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Kasus Inspektorat Kabupaten Bengkulu Tengah). *Jurnal Akuntansi Unihaz-JAZ Vol.1 No.2*
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayat, T., Putri, M.A & Murialti, N. (2021). Pengaruh Good Governance, Kompetensi, Dan Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kampar. *SNEBA Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Bisnis dan Akuntansi Volume 1, 87-89*
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2020. Keputusan Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. 2022. Laporan Kinerja Tahun 2021

- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Kementerian Keuangan. 2022. Laporan Kinerja Tahun 2022 Kementerian Keuangan
- Koiman. (2014). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Lind, D.A., Marchal., William, G., Wathen, Adam, S & Hartarto, R.B. (2014). *Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi
- Maryani, N. I. (2016). “Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Bintan)”.
- Mudrikah, F & Karlina, A. (2020). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada SKPD Kabupaten Lampung Timur). *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan Volume 3. No. 2*, 166-188, <https://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JPK/article/view/535/380>
- Nasir, A & Gunawan, A. (2019). Implementasi Good Governance Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar Volume 10. No. 1*, 760-766
- Oktavia, A., Bustami, E & Megawati. (2021). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (Add) (Studi Kasus Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Tanah Kampung). *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa Volume 3. No. 11*, 118-132, <https://doi.org/10.51279/janmaha.v3i11.528>
- Pratama, R., Agustin, H & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1) Seri D*, 429-444, <https://doi.org/10.24036/jea.v1i1.85>
- Rahman, Y & Firdaus, F. (2020). Pengaruh Penerapan Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Di Kabupaten Barito Kuala. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis, Jilid 6 Hal* 410-420, <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>
- Ramadhania, S & Novianty, I. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Prosiding 11th Industrial Research Workshop and National Seminar (IRWNS) Volume 11. No. 1*, 807-813
- Republik Indonesia. (1999). Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 *tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Republik Indonesia. (2006). Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 *tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Republik Indonesia. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintah*
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 *tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 *tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang No 5 Tahun 2014 *tentang Aparatur Sipil Negara*
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 *tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2020 – 2024*
- Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 *tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara*
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 *tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah*
- Republik Indonesia. (2020). Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun

- 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024
- Rustiana, C.D. (2016). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bandung). *Jurnal Ilmiah Widya Ekonomika Vol 1*. 141-146
- Setyowati, L. (2020). Kompetensi Sebagai Pemoderasi Pengelolaan Keuangan Dan Penerapan Akuntansi Terhadap Akuntabilitas Kinerja. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma Vol 5. No. 2*, 1-10, <https://jamal.ub.ac.id/index.php/jamal/issue/archive>
- Triwardana, D. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten Ogan Ilir). *JOM Fekon Vol. 4 No. 1*. 641-65